

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	20
2.1 Demokrasi	20
2.2 <i>Good Governance</i>	25
2.3 Ruang Publik	29
2.4 Pengambilan Kebijakan secara Teknokratis.....	33
2.5 <i>Evidence Based Policy</i>	38
2.6 Pengambilan Kebijakan dengan Pendekatan Pluralis	42

2.7 Pendekatan Elitis	48
2.8 <i>Civil Society</i>	53
2.9 Alur Berpikir Penelitian	58
BAB III METODE PENELITIAN	62
3.1 Jenis Penelitian	62
3.2 Lokasi Penelitian	66
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	73
3.4 Teknik Analisis Data	85
BAB IV KEBIJAKAN REKLAMASI DAN PERLAWANAN RAKYAT	88
4.1 Deskripsi SK No. 2138/02-C/HK/2012.....	89
4.2 Deskripsi SK No. 1727/01-B/HK/2013.....	93
4.3 Terbitnya Perpres 51 Tahun 2014	97
4.4 Perlawanan Rakyat Bali menentang Penguasa dan Pengusaha	105
4.4.1 ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi)	105
4.4.2 KNTRTB Rapatkan Barisan Tolak Reklamasi	113
4.4.3 Penolakan dari Masyarakat Desa Pakraman Tanjung Benoa	114
4.4.4 Rakyat Bali melawan Reklamasi	118
BAB V FORMULASI KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK BENOA	121
5.1 Tujuan dan Rencana Reklamasi Teluk Benoa.....	122
5.2 Terbitnya SK Reklamasi Jilid 1 - Kompromi Eksekutif dan Legislatif	132
5.3 Terbitnya SK Reklamasi Jilid 2 - Hasil FS UNUD “Tidak Layak”	147
5.4 Kejanggalan Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa	154

5.4.1 Denpasar Menolak, Badung Turut Aturan.....	154
5.4.2 Adu Kepentingan Elit Partai Politik	158
5.5 Hilangnya Peran Masyarakat Sipil dalam Formulasi Kebijakan.....	164
BAB VI DEMOKRASI DAN RUANG PUBLIK	174
6.1 Defisit Demokrasi.....	175
6.2 Pergeseran Ruang Publik - Tekanan <i>Private</i>	177
6.3 <i>Good Governance</i> model Neo-Liberal	181
6.4 Ambiguitas Pendekatan Teknokratis.....	185
6.5 Lemahnya <i>Evidence Based Policy</i>	190
6.6 Kebijakan Elitis	196
6.7 Terbentuknya <i>Civil Society</i>	199
6.8 Tawaran dari Kebijakan Pluralis	202
BAB VII PENUTUP.....	207
7.1 Kesimpulan.....	207
7.2 Saran	213
DAFTAR PUSTAKA	218
LAMPIRAN.....	228